



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KAPANEWON SEMIN TAHUN 2025-2029

KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

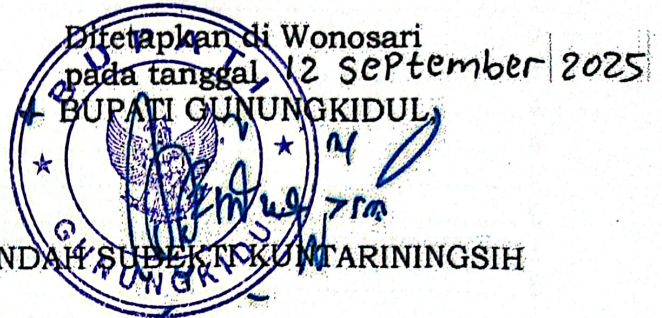
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SEMIN	6
2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Semin	6
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Semin	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029	22
3.2 Strategi Kapanewon Semin dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	23
3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Semin dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	24
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	26
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bagan Struktur	6
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Semin	7
Tabel 2.3 Data Pegawai Kapanewon Semin Menurut Golongan/Pangkat	8
Tabel 2.4 Data Pegawai Kapanewon Semin Menurut Pendidikan	8
Tabel 2.5 Sarana prasarana Kapanewon Semin	8
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul	13
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun	14
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	19
Tabel 2.9 Isu Strategis Kapanewon Semin	20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semin	22
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	23
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kapanewon Semin	24
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Semin	25
Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD	28
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan dan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	38
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	72
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semin	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Korelasi Renstra PD – Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	27

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-
2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengamanahkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih baik.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran serta isu strategis dan kebijakan strategis yang ingin dicapai yang meliputi kebijakan program dan kegiatan mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang. Sedangkan rencana kerja memuat program dan kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA), yang pada hakekatnya sebagai arah kegiatan Kapanewon Semin dan tentunya dapat ditinjau kembali (direvisi) sesuai perkembangan dan perjalanan waktu.

Sebagai dasar pertimbangan perlunya dilakukan penyusunan Renstra adalah dalam rangka meningkatkan mutu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Semin agar lebih bersifat outcome. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah konsekuensi dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6).

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 dalam hal program, target, dan indikator kinerja. Dimana target kumulatif lima (5) tahun ini dijabarkan kedalam target tahunan untuk mengetahui tingkat capaian setiap tahunnya (tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima). Dengan demikian setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termasuk Kapanewon Semin wajib menyusun Rencana Strategis. Jadi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target dan

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kapanewon Semin ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunungkidul di Kapanewon Semin, yang memuat arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kapanewon Semin untuk jangka waktu lima tahunan.

Dengan demikian Rencana Strategis adalah merupakan proses yang dilakukan oleh Kapanewon Semin dalam rangka menentukan strategi atau arahan dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (modal, sumber daya alam dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari Rencana Strategis Kapanewon Semin.

Renstra Perangkat Daerah mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

1.1.1. Pengertian Renstra PD

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

1.1.2. Fungsi Renstra PD

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi atau manfaat Perubahan Renstra PD adalah sebagai berikut:

1. untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. untuk pengelolaan keberhasilan;
3. berorientasi masa depan;
4. adaptif;
5. pelayanan prima;
6. meningkatkan komunikasi;
7. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi;
8. meningkatkan produktifitas.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra PD

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu :

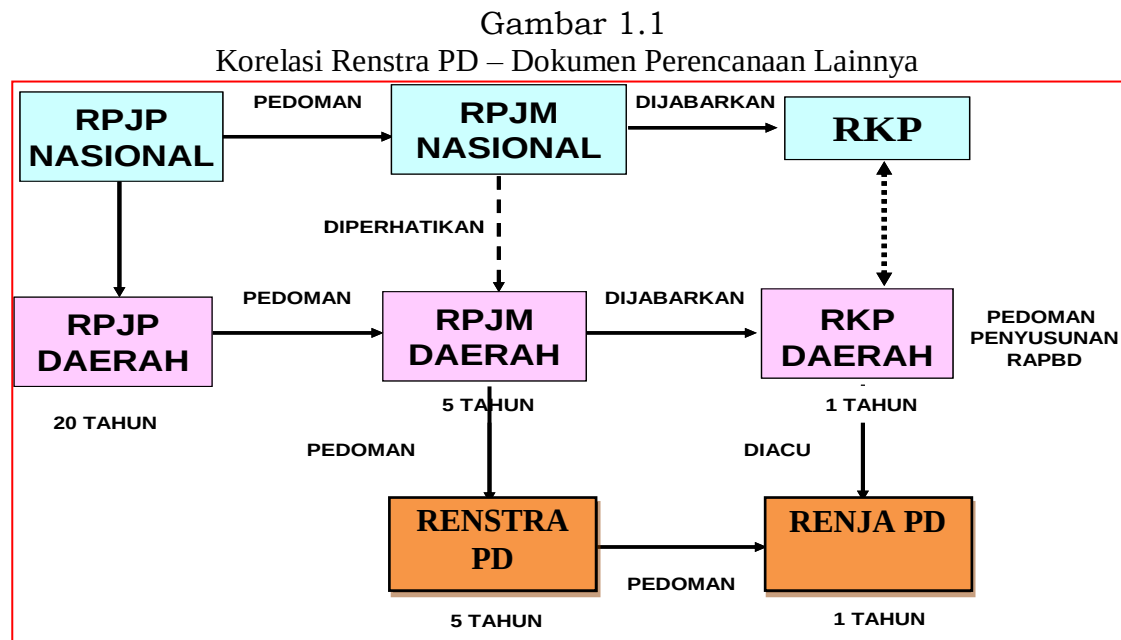
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perumusan/penyusunan

- a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD;
 - c. Review Renstra dan Renstra PD Provinsi;
 - d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - e. Perumusan Isu-isu Strategis;
 - f. Perumusan visi dan misi PD;
 - g. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
 - h. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.
3. Tahap Verifikasi
 4. Tahap Penetapan

1.1.4. Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra PD disusun berpedoman pada RPJMD, sedangkan RPJMD memperhatikan RPJMNas. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan RPJP Daerah memperhatikan pada RPJPNas. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Renstra PD merupakan pedoman bagi penyusunan Renja PD tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Kaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam bagan berikut:



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan terutama pencapaian tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Semin;
2. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan dan berinteraksi dengan *stakeholders (positioning organization)*;
3. Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif terhadap perubahan yang semakin kompleks;
4. Memberikan pemahaman dan kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kinerja dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur, serta keberhasilan pencapaian tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I.	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SEMIN
2.1	Gambaran Pelayanan Kapanewon Semin
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Semin
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029
3.2	Strategi Kapanewon Semindalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.3	Arah Kebijakan Kapanewon Semin dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KAPANEWON SEMIN

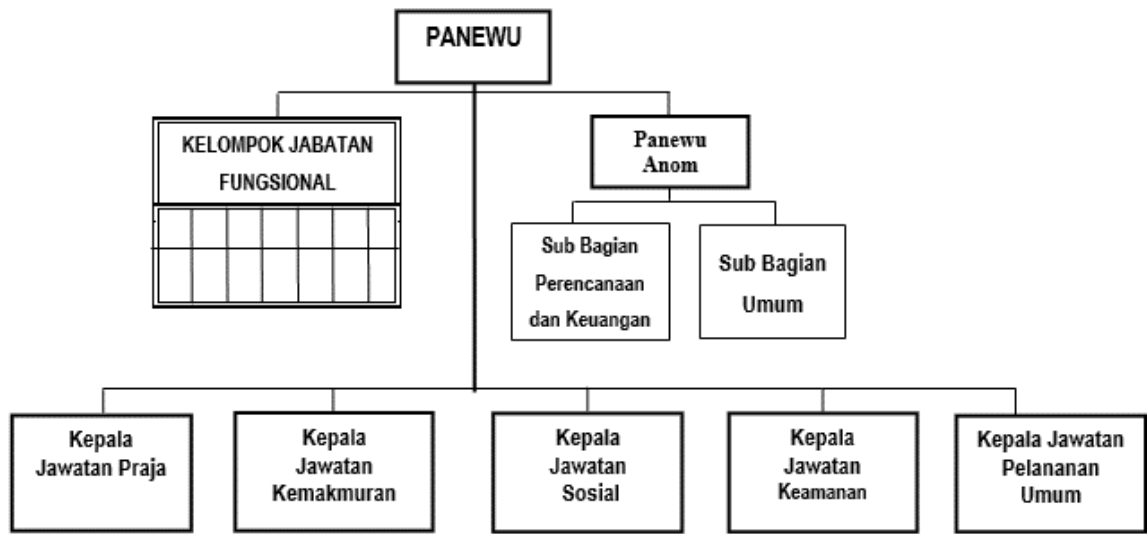
2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Semin

2.1.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kapanewon Semin

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bagan Struktur



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Semin

Penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, didukung dengan pegawai sebanyak 16 orang ASN pada Bulan Januari Tahun 2025. Adapun data jumlah ASN Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kapanewon Semin

No	Bulan	Jumlah Pegawai
1	Januari	16
2	Februari	15
3	Maret	15
4	April	15
5	Mei	15
6	Juni	15
7	Juli	15
8	Agustus	15
9	September	15
10	Oktober	15
11	November	15
12	Desember	15

Sumber : Data Sub Bagian Umum Kapanewon Semin 2025

Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kapanewon Semin pada Bulan Januari Tahun 2025 sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan.

Sedangkan komposisi pegawai Kapanewon Semin berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Kapanewon Semin
Menurut Golongan/Pangkat

No	Nama Instansi	JML ASN	Golongan Ruang													
			I	II				III				IV				VII
			d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Panewu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.	Panewu Anom	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.	Jawatan Praja	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4.	Jawatan Keamanan	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5.	Jawatan Sosial	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6.	Jawatan Kemakmuran	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	Jawatan Pelayanan Umum	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8.	Subbag. Perenc. & Keu	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	Subbag. Umum	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		16	1	0	0	1	3	1	2	1	5	0	1	0	0	1

Sumber: Data Sub Bagian Umum Kapanewon Semin 2025

Tabel 2.4
Data Pegawai Kapanewon Semin
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pascasarjana (S-2)	0	
2.	Sarjana (S-1)	9	
3.	Diploma III	1	
4.	SLTA/ sederajat	6	
Jumlah		16	

Sumber : Data Sub Bagian Umum Kapanewon Semin 2025

Secara kuantitas Jumlah pegawai di Kapanewon Semin belum cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dikarenakan ada pejabat struktural dan beberapa staf yang memasuki masa pra pensiun.

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di Kapanewon Semin secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana prasarana di Kapanewon Semin

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	2012	20.000,00	-		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1970	5.000,00	-		
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	2013	175.048.900,00	Baik		
4	Sepeda Motor	1	2004	11.000.000,00	Baik		
5	Sepeda Motor	1	2012	13.891.500,00	Baik		
6	Sepeda Motor	1	2014	14.570.200,00	Baik		
7	Sepeda Motor	2	2014	29.515.200,00	Baik		
8	Sepeda Motor	2	2017	32.900.000,00	Baik		
9	Sepeda Motor	1	2017	16.824.500,00	Baik		
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2020	2.500.000,00	Baik		
11	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2014	1.700.000,00	Baik		
12	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2017	2.500.000,00	Baik		
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2008	2.600.000,00	Baik		
14	Filing Cabinet Besi	1	1998	650.000,00	Baik		
15	Filing Cabinet Besi	1	1998	650.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Filing Cabinet Besi	2	2005	1.900.000,00	Baik		
17	Filing Cabinet Besi	2	2011	3.900.000,00	Baik		
18	Filing Cabinet Besi	2	2016	4.000.000,00	Baik		
19	Filing Cabinet Besi	1	2019	2.500.000,00	Baik		
20	Filing Cabinet Besi	1	2020	3.000.000,00	Baik		
21	Brandkas	1	1994	200.000,00	Baik		
22	CCTV - Camera Control Television System	1	2019	5.000.000,00	Baik		
23	Papan Visual/Papan Nama	1	2019	1.200.000,00	Baik		
24	Papan Visual/Papan Nama	1	2018	6.500.000,00	Baik		
25	Alat Penghancur Kertas	1	2019	2.500.000,00	Baik		
26	Papan Nama Instansi	1	2018	7.500.000,00	Baik		
27	Layar Overhead	1	2015	1.000.000,00	Baik		
28	Sice	1	1998	555.000,00	Baik		
29	Sice	1	2005	850.000,00	Baik		
30	Sice	1	2006	1.800.000,00	Baik		
31	Sice	1	2013	2.300.000,00	Baik		
32	Meja Rapat	10	2013	11.000.000,00	Baik		
33	Meja Rapat	10	2014	11.000.000,00	Baik		
34	Meja Rapat	15	2018	18.136.020,00	Baik		
35	Meja Rapat	8	2020	12.000.000,00	Baik		
36	Meja Resepsionis	1	2007	2.400.000,00	Baik		
37	Meja Resepsionis	1	2008	2.500.000,00	Baik		
38	Meja Resepsionis	2	2015	6.700.000,00	Baik		
39	Meja 1/2 Biro	5	2020	6.500.000,00	Baik		
40	Meja 1/2 Biro	7	2019	10.500.000,00	Baik		
41	Kursi Rapat	20	2005	4.736.000,00	Baik		
42	Kursi Rapat	50	2013	18.750.000,00	Baik		
43	Kursi Rapat	30	2014	11.850.000,00	Baik		
44	Kursi Rapat	25	2017	10.000.000,00	Baik		
45	Kursi Rapat	20	2018	8.060.420,00	Baik		
46	Kursi Rapat	30	2019	15.000.000,00	Baik		
47	Kursi Putar	4	2013	3.000.000,00	Baik		
48	Kursi Putar	2	2011	1.960.000,00	Baik		
49	Kursi Putar	2	2017	2.000.000,00	Baik		
50	Meja Komputer	1	2013	465.000,00	Baik		
51	Lemari Kayu	1	2014	2.000.000,00	Baik		
52	Lemari Kayu	1	2016	3.000.000,00	Baik		
53	Rak Kayu	1	2019	3.000.000,00	Baik		
54	Kursi Tunggu	3	2014	2.100.000,00	Baik		
55	Kursi Tunggu	2	2017	3.400.000,00	Baik		
56	A.C. Split	2	2017	10.000.000,00	Baik		
57	Kipas Angin	2	2014	680.000,00	Baik		
58	Kipas Angin	1	2006	420.000,00	Baik		
59	Kipas Angin	1	2015	600.000,00	Baik		
60	Kipas Angin	1	2017	800.000,00	Baik		
61	Kipas Angin	2	2015	1.600.000,00	Baik		
62	Ac Unit	1	2012	4.500.000,00	Baik		
63	Ac Unit	2	2017	9.612.250,00	Baik		
64	Ac Unit	6	2017	28.836.750,00	Baik		
65	Sound System	1	2018	12.000.000,00	Baik		
66	Karaoke	1	2004	2.500.000,00		Kurang Baik	
67	Unit Power Supply	3	2015	1.500.000,00	Baik		
68	Unit Power Supply	1	2016	500.000,00	Baik		
69	Unit Power Supply	1	2016	500.000,00	Baik		
70	Stabilisator	2	2017	1.800.000,00	Baik		
71	Dispenser	1	2011	475.000,00	Baik		
72	Dispenser	2	2019	1.500.000,00	Baik		
73	Dispenser	2	2020	1.500.000,00	Baik		
74	Mimbar/Podium	1	2013	1.500.000,00	Baik		
75	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1994	500.000,00	Baik		
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2014	1.800.000,00	Baik		
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	2018	9.068.040,00	Baik		
78	Camera Digital	1	2015	5.000.000,00	Baik		
79	Proyektor + Attachment	1	2016	7.000.000,00	Baik		
80	Proyektor + Attachment	1	2011	10.514.420,00	Baik		
81	Telephone (PABX)	1	2020	4.000.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Loudspeker	1	2019	6.000.000,00	Baik		
83	Sound System	1	2015	1.000.000,00	Baik		
84	Sound System	1	2014	4.050.000,00	Baik		
85	Internet	1	2018	1.456.000,00	Baik		
86	Internet	1	2018	2.411.500,00	Baik		
87	P.C Unit	1	2014	4.500.000,00	Baik		
88	P.C Unit	1	2019	4.500.000,00	Baik		
89	P.C Unit	1	2013	5.000.000,00	Baik		
90	P.C Unit	1	2017	5.263.300,00	Baik		
91	P.C Unit	1	2011	6.601.888,00	Baik		
92	P.C Unit	1	2008	9.900.000,00	Baik		
93	P.C Unit	1	2020	12.000.000,00	Baik		
94	Lap Top	1	2015	4.500.000,00	Baik		
95	Lap Top	2	2019	14.000.000,00	Baik		
96	Lap Top	1	2016	7.000.000,00	Baik		
97	Lap Top	1	2019	7.000.000,00	Baik		
98	Lap Top	1	2010	7.558.918,00	Baik		
99	Note Book	1	2018	4.000.000,00	Baik		
100	Note Book	1	2017	7.000.000,00	Baik		
101	CPU (Peralatan Mainframe)	1	2018	4.989.200,00	Baik		
102	Printer	1	2010	608.772,00	Baik		
103	Printer	1	2011	710.310,00	Baik		
104	Printer	1	2014	1.000.000,00	Baik		
105	Printer	1	2011	1.507.999,00	Baik		
106	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	1.000.000,00	Baik		
107	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2019	1.200.000,00	Baik		
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2019	1.300.000,00	Baik		
109	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2020	1.500.000,00	Baik		
110	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2016	2.000.000,00	Baik		
111	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2017	4.491.450,00	Baik		
112	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2019	900.000,00	Baik		
113	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2017	791.706.000,00	Baik		
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2013	1.536.318.713,92	Baik		
115	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	2017	94.232.000,00	Baik		
116	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	2020	40.474.000,00	Baik		
117	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	2011	146.189.000,00	Baik		
118	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	2011	9.277.500,00	Baik		
119	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	2017	93.156.000,00	Baik		
120	Meja Rapat	12	2000	180.000,00	Baik		
121	Meja ½ Biro	18	2000	250.200,00	Baik		
122	Meja ½ Biro	1	2000	13.900,00	Baik		
123	Meja ½ Biro	8	2000	112.000,00	Baik		
124	Kursi Lipat	35	2005	5.205.375,00	Baik		
125	Lemari Kayu	9	1994	225.000,00	Baik		
126	Lemari Kayu	1	1994	25.000,00	Baik		
127	Gorden	1	2014	4.500.000,00	Baik		
128	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7	2000	700.000,00	Baik		
129	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	9.000,00	Baik		
130	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	12.500,00	Baik		
131	Buku Peraturan Perundang- undangan	2	2014	30.000,00	Baik		
132	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	16.000,00	Baik		
133	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	18.000,00	Baik		
134	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	20.000,00	Baik		
135	Buku Peraturan Perundang- undangan	3	2014	75.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
136	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	27.500,00	Baik		
137	Buku Peraturan Perundang- undangan	1	2014	32.000,00	Baik		
138	Mesin Absensi	1	2011	3.886.000,00			Rusak Berat
139	Kursi Putar	1	2013	750.000,00			Rusak Berat
140	Kursi Putar	2	2017	2.000.000,00		Rusak Ringan	
141	Stabilisator	1	2017	900.000,00		Rusak Ringan	
142	Unit Tranceiver HF Stationery	1	1981	2.000.000,00	Baik		
143	P.C Unit	1	2008	7.000.000,00			Rusak Berat
144	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	750.000,00			Rusak Berat
145	Meja Rapat	8	2000	120.000,00			Rusak Berat
146	Kursi Lipat	10	2005	1.487.250,00			Rusak Berat
147	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	2	2000	200.000,00			Rusak Berat
JUMLAH				3.514.691.475,92			

Sumber: Data Sub Bagian Umum Kapanewon Semin 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah kapanewon dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kapanewon mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan kalurahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh jawatan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat diampu oleh jawatan Pelayanan Umum melalui Pelayanan satu pintu di kapanewon.

Pelayanan satu pintu yang dilaksanakan di lingkungan Kapanewon Semin terdiri dari:

- 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- 3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4. Pelayanan Dispensasi Nikah;
- 5. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang Penduduk;
- 6. Pelayanan IUMK;
- 7. Pelayanan Bidang Praja (Rekomendasi Pertanahan dan Perbankan bagi Pamong);

8. Pelayanan Bidang Sosial (Rekomendasi SKTM, Rekomendasi Pengajuan BPJS, Surat Keterangan Adopsi Anak, Rekomendasi Surat Keterangan Organisasi Kesenian);
 9. Pelayanan Bidang Kemakmuran (Rekomendasi Proposal Pengajuan bantuan Bidang Ekonomi);
 10. Pelayanan Bidang Keamanan (Rekomendasi ijin Kegiatan Organisasi Masyarakat);
 11. Pelayanan Umum (Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Usaha, Rekomendasi Surat Pengajuan Pengurangan Daya PLN, Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Terikat Perjanjian Dinas);
- Analisa terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Dari ketiga indikator hasilnya masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang ada.
2. Untuk anggaran Kapanewon Semin dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran dikarenakan adanya sebuah kebijakan, sedangkan untuk realisasi anggaran setiap tahunnya sebagian tidak terealisasi 100% dikarenakan ada beberapa rekening yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan (listrik dan air).

Hasil dari capaian kinerja pelayanan dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target	Target Renstra Perangkat Daerah tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	80	78,07	78,50	79,00	79,50	80,00	75,60	76,91	79,00	79,50	80,00	0,97	0,98	1,00	1,00	1	SKM
2	Persentase Desa yang menetapkan APBdesa dan RKPDesa Tepat waktu	100	90	100	100	100	100	80	90	90	95	100	0,89	0,90	0,90	0,95	1	dokumen
3	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	dokumen
4	Persentase Kesesuaian Program dalam rencana Kerja (Renja) PD terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	dokumen

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Semin
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	135.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	135.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100	100	100	0	0	335.000.000	335.000.000
Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	135.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	135.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100	100	100	0	0	335.000.000	335.000.000
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	25.970.000	35.000.000	116.270.000	0	0	25.970.000	35.000.000	115.320.000	0	0	100	100	99	0	0	177.240.000	176.290.000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	35.000.000	116.270.000	0	0	25.970.000	35.000.000	115.320.000	0	0	100	100	99	0	0	177.240.000	176.290.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.071.233.333	1.214.747.916	1.315.308.224	0	0	1.934.914.043	1.205.925.336	1.304.785.311	0	0	93	99	99	0	0	4.601.289.473	4.445.624.690
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.422.500	36.660.000	39.325.000	0	0	27.342.500	35.737.500	39.222.500	0	0	100	97	100	0	0	103.407.500	102.302.500

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.663.990.833	940.930.192	1.041.863.824	0	0	1.529.397.174	935.646.181	1.040.660.412	0	0	92	99	100	0	0	3.646.784.849	3.505.703.767
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.480.000	8.100.000	8.471.900	0	0	3.480.000	8.100.000	7.944.350	0	0	100	100	94	0	0	20.051.900	19.524.350
Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.120.000	68.042.500	32.327.500	0	0	56.120.000	68.042.500	32.327.500	0	0	100	100	100	0	0	156.490.000	156.490.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	5.325.000	0	0	0	3.000.000	5.200.000	0	0	0	100	98	0	0	0	8.325.000	8.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.910.000	64.870.224	63.795.000	0	0	49.387.269	62.379.155	63.462.049	0	0	97	96	99	0	0	179.575.224	175.228.473
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.950.000	90.820.000	129.525.000	0	0	73.827.100	90.820.000	121.168.500	0	0	100	100	94	0	0	294.295.000	285.815.600
Penataan Organisasi	192.360.000	0	0	0	0	192.360.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	192.360.000	192.360.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	344.930.000	659.865.000	124.858.000	0	0	344.790.000	658.200.000	124.073.100	0	0	100	100	99	0	0	1.129.653.000	1.127.063.100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.540.000	12.690.000	9.790.000	0	0	148.540.000	12.690.000	9.790.000	0	0	100	100	100	0	0	171.020.000	171.020.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	196.390.000	68.275.000	115.068.000	0	0	196.250.000	66.610.000	114.283.100	0	0	100	98	99	0	0	379.733.000	377.143.100
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	578.900.000	0	0	0	0	578.900.000		0	0	0	100	0	0	0	578.900.000	578.900.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	430.755.000	56.147.000	43.887.000	0	0	430.140.000	56.147.000	43.887.000	0	0	100	100	100	0	0	530.789.000	530.174.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	223.695.000	36.147.000	30.177.000	0	0	223.080.000	36.147.000	30.177.000	0	0	100	100	100	0	0	290.019.000	289.404.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	207.060.000	20.000.000	13.710.000	0	0	207.060.000	20.000.000	13.710.000	0	0	100	100	100	0	0	240.770.000	240.770.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.500.000	19.260.000	9.175.000	0	0	7.500.000	19.260.000	9.175.000	0	0	100	100	100	0	0	35.935.000	35.935.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	19.260.000	9.175.000	0	0	6.000.000	19.260.000	9.175.000	0	0	100	100	100	0	0	34.435.000	34.435.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77.325.000	73.660.000	127.010.000	0	0	77.325.000	73.660.000	126.937.100	0	0	100	100	100	0	0	277.995.000	277.922.100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.325.000	73.660.000	127.010.000	0	0	77.325.000	73.660.000	126.937.100	0	0	100	100	100	0	0	277.995.000	277.922.100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	143.517.500	26.620.000	20.910.000	0	0	143.517.500	26.620.000	20.310.000	0	0	100	100	97	0	0	191.047.500	190.447.500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	143.517.500	26.620.000	20.910.000	0	0	143.517.500	26.620.000	20.310.000	0	0	100	100	97	0	0	191.047.500	190.447.500
Jumlah	3.236.230.833	2.185.299.916	1.857.418.224	0	0	3.099.156.543	2.174.812.336	1.844.487.511	0	0	96	100	99	0	0	7.278.948.973	7.118.456.390

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Semin

Pelayanan dalam dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapanewon Semin, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Semin dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perizinan, legalisasi, dispensasi dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan pada Kapanewon Semin adalah masyarakat dan pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

2.1.5. Mitra Kapanewon Semin Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di kapanewon Semin. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Semin

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanwon Semin

Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Semin memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Semin dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan kewenangan kapanewon	Tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Kewenangan Kapanewon yang terbatas secara regulasi
Kapasitas Aparatur belum memadai	Kualitas SDM belum mendukung pelaksanaan tugas pelayanan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
		Rekrutmen SDM belum berbasis kebutuhan riil dan kompetensi
Sarana dan prasarana belum memadai	Fasilitas pelayanan publik tidak mendukung pelayanan optimal	Keterbatasan pembangunan fasilitas dan infrastruktur
		Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan nyata
Tata kelola pemerintahan belum efektif	Transformasi digital belum berjalan maksimal	Lemahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam digitalisasi pelayanan
		Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan Kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tabel 2.9
Isu Strategis Kapanewon Semin

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governanc e	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang revelan dengan Kapanewon Semin berdasarkan dokumen KLHS adalah masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang dibagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Semin adalah Pilar ke-empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu:

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

Adapun permasalahan dan potensi lain yang ada di Kapanewon Semin sebagai berikut:

1. Permasalahan
 - a. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan keberadaan Kapanewon Semin yang berada di wilayah perbatasan maka akan menimbulkan permasalahan yang komplek sehingga perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Dalam upaya peningkatan perekonomian secara menyeluruh maka diperlukan penataan ruang wilayah perkotaan di Kapanewon semin.
 - c. Banyaknya hasil industri olahan seperti, kerajinan akar wangi, mainan anak-anak, dan lain-lain di Kapanewon Semin yang masih dipasarkan secara tradisional sehingga perlu dioptimalkan pengelolaanya.

2. Potensi

- a. Wilayah Kapanewon Semin merupakan pintu masuk wisata dari arah utara dan timur Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat mengembangkan pemasaran industri olahan produk lokal.
- b. Dengan adanya penataan wilayah perkotaan Kapanewon Semin dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- c. Pemasaran hasil industri olahan produk lokal di Kapanewon Semin dapat meningkat dengan diadakannya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri.
- d. Adanya kerjasama dengan wilayah lain berkaitan dengan pengelolaan wisata dan penanganan Keamanan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sedangkan Sasaran Renstra merupakan rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Kapanewon Semin berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri yang terdapat beberapa sasaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Semin yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon.

Kapanewon Semin telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	97,67	97,68	97,69	97,70	97,71	97,72	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase kegiatan sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	88,60	

3.2 Strategi Kapanewon Semin dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Semin mengambil langkah atau strategi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon
- 2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon
- 3. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
- 4. Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi RPJMD didapatkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Kapanewon Semin sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS Visi Misi (keempat)		Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Dokumen keuangan yang berkualitas		
	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Pelayanan umum yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon

Adapun penahapan Renstra Kapanewon Semin yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kapanewon Semin

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tahun 2026 merupakan tahap pertama dalam penahapan renstra Kapanewon Semin yaitu dengan menitikberatkan pada penguatan penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas, tahap kedua atau tahun 2027 yaitu menitikberatkan pada percepatan penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas, tahap ketiga atau tahun 2028 menitikberatkan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas, tahap keempat yaitu tahun 2029 menitikberatkan pada optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas dan tahun terakhir tahun 2030 menitikberatkan pada pemantapan penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas.

3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Semin dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Semin mengacu pada arah kenijakan RPJMD dan mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Kapanewon Semin

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program.

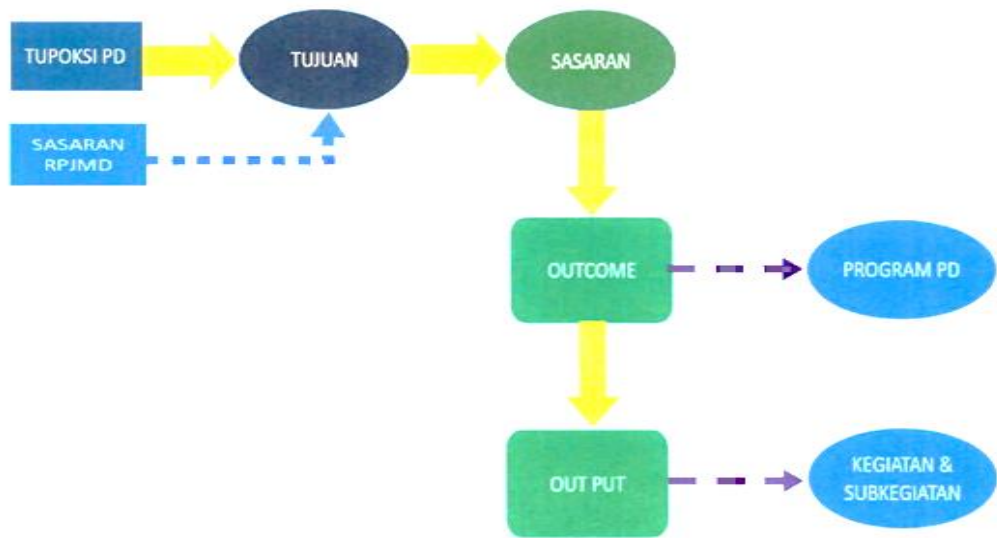
Perumusan rencana sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereview kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Memeriksa apakah tujuan, dan sasaran PD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra PD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD.
3. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD;
4. Berdasarkan (2) dan (3), kemudian dirumuskan target *outcome* program PD untuk mencapai sasaran pembangunan;
5. Melakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program PD;
6. Melakukan perumusan sub kegiatan;
7. Menghitung biaya sub kegiatan untuk mencapai target output sub kegiatan
8. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
9. Menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
10. Menghitung apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD;
11. Menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
12. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), kemudian disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian teknis yang

menjabarkan arah kebijakan dan strategi ke dalam bentuk operasional yang dapat diukur, dianggarkan, dan dilaksanakan.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Kemudian dari kerangka tersebut dirumuskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semin			Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan			Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya berbasis masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semin				
				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Laporan pelayanan umum yang disusun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka diperoleh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Kapanewon Semin tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan dan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya berbasis masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semin	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00 .0.00.12. 0000 - Kapanewon Semin	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Yogyakarta (Laporan)													
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semin	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00 .0.00.12. 0000 - Kapanewon Semin	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke- mantren dan Kalurahan/Kel- urahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.187.245.2 63		2.277.141.04 3,31		2.302.513.0 88,36		2.368.239.80 8,51		2.378.191.7 74,46		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.422.410.1 63		1.487.463.04 3,31		1.497.295.0 88,36		1.547.571.80 8,51		1.544.073.7 74,46		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,5	81,95	1.422.410.1 63	82	1.487.463.04 3,31	82,05	1.497.295.0 88,36	82,1	1.547.571.80 8,51	82,15	1.544.073.7 74,46	7.01.0.00 .0.00.12. 0000 - Kapanew on Semin	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.164.500		49.754.500		49.854.500		50.054.500		50.154.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	49.164.500	2	49.754.500	2	49.854.500	2	50.054.500	2	50.154.500			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2				2				2				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2				2				2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Laporan Capaian	17	17				17				17				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				38.954.500		38.954.500		38.954.500		38.954.500		38.954.500		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	2	38.954.500	2	38.954.500	2	38.954.500	2	38.954.500	2	38.954.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Daerah (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.100.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	1	1.400.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.800.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000		2.100.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	1.800.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	17	17	3.000.000	17	3.200.000	17	3.200.000	17	3.200.000	17	3.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.210.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.210.000	4	2.300.000	4	2.300.000	4	2.300.000	4	2.300.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.142.345.263		1.151.723.543,31		1.171.780.588,36		1.212.907.308,51		1.213.859.274,46		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.142.345.263	1	1.151.723.543,31	1	1.171.780.588,36	1	1.212.907.308,51	1	1.213.859.274,46		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224				224		224		224			
	Jumlah Laporan	13	13				13		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.136.785.2 63		1.145.823.54 3,31		1.165.780.5 88,36		1.206.907.30 8,51		1.207.859.2 74,46		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224	1.136.785.2 63	224	1.145.823.54 3,31	224	1.165.780.5 88,36	224	1.206.907.30 8,51	224	1.207.859.2 74,46		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1.300.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.260.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD (Laporan)	13	13	4.260.000	13	4.500.000	13	4.500.000	13	4.500.000	13	4.500.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	1.000.000	24	1.200.000	24	1.400.000	24	1.600.000	24	1.800.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	1.000.000	24	1.200.000	24	1.400.000	24	1.600.000	24	1.800.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.508.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.508.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.508.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.508.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.280.000		76.750.000		58.900.000		60.000.000		61.600.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	54.280.000	6	76.750.000	6	58.900.000	6	60.000.000	6	61.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365	365		365		365		365		365			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera	4	4		4		4							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.150.000		3.300.000		3.400.000		3.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.000.000	4	3.150.000	4	3.300.000	4	3.400.000		3.500.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.520.000		53.000.000		34.500.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	31.520.000	6	53.000.000	6	34.500.000	6	35.000.000	6	36.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.400.000		5.500.000		5.600.000		5.700.000		5.800.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	5.400.000	2	5.500.000	2	5.600.000	2	5.700.000	2	5.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.810.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000		3.300.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	2.810.000	10	3.000.000	10	3.100.000	10	3.200.000	10	3.300.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365	365	1.200.000	365	1.300.000	365	1.400.000	365	1.500.000	365	1.600.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.500.000	12	1.600.000	12	1.700.000	12	1.800.000	12	1.900.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.850.000		9.200.000		9.300.000		9.400.000		9.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.850.000	12	9.200.000	12	9.300.000	12	9.400.000	12	9.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		28.000.000		33.000.000		38.000.000		29.000.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	28.000.000	2	33.000.000	3	38.000.000	2	29.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21	0		5		20		20		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		10.000.000		15.000.000		17.000.000		8.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21	0	0	5	10.000.000	20	15.000.000	20	17.000.000	10	8.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	14.000.000	2	14.000.000	3	14.000.000	2	14.000.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	2.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.000.000		0		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	2.000.000	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.557.400		77.255.000		78.255.000		79.255.000		80.255.000		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	76.557.400	12	77.255.000	12	78.255.000	12	79.255.000	12	80.255.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	yang Disediakan (Laporan)															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12				12				12					12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	73	73				73				73					73
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				32.255.000		32.255.000		32.255.000		32.255.000		32.255.000				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	32.255.000	12	32.255.000	12	32.255.000	12	32.255.000	12	32.255.000				
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.702.400		44.400.000		45.400.000		46.400.000		47.400.000				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	73	73	43.702.400	73	44.400.000	73	45.400.000	73	46.400.000	73	47.400.000				
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.555.000		96.780.000		98.105.000		99.755.000		101.405.000		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	143	143	93.555.000	143	96.780.000	143	98.105.000	143	99.755.000	143	101.405.000		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30				30				30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12				12				12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	18				13				13			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)													
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.100.000		44.205.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	143	143	42.100.000	143	44.205.000	143	45.000.000	143	46.000.000	143	47.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.500.000		1.700.000		1.850.000		2.000.000		2.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30	1.500.000	30	1.700.000	30	1.850.000	30	2.000.000	30	2.200.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.400.000		8.820.000		9.000.000		9.300.000		9.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	18	8.400.000	13	8.820.000	13	9.000.000	13	9.300.000	13	9.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.755.000		37.755.000		37.755.000		37.755.000		37.755.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1	1	37.755.000	1	37.755.000	1	37.755.000	1	37.755.000	1	37.755.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)													
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.800.000		4.300.000		4.500.000		4.700.000		4.950.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	12	12	3.800.000	12	4.300.000	12	4.500.000	12	4.700.000	12	4.950.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.245.000		7.500.000		7.800.000		8.000.000		8.400.000		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	7.245.000	100	7.500.000	100	7.800.000	100	8.000.000	100	8.400.000	7.01.0.00. 0.00.12.00 00 - Kapanewo n Semin	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.245.000		7.500.000		7.800.000		8.000.000		8.400.000		
Jumlah Laporan pelayanan umum yang disusun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	14	12	7.245.000	12	7.500.000	12	7.800.000	12	8.000.000	12	8.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.245.000		7.500.000		7.800.000		8.000.000		8.400.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	12	7.245.000	12	7.500.000	12	7.800.000	12	8.000.000	12	8.400.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				77.692.000		79.300.000		86.300.000		94.050.000		102.000.000		
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	4.120.000	100	5.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	7.01.0.00. 0.00.12.00 00 - Kapanewo n Semin	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				4.120.000		5.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga		25	4.120.000	2.525	5.000.000	25	7.000.000	25	8.000.000	25	9.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kecamatan dan Kelurahan	Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)													
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		25				25				25			
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				2.060.000		2.500.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		25	2.060.000	25	2.500.000	25	3.500.000	25	4.000.000	25	4.500.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				2.060.000		2.500.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)		25	2.060.000	2.525	2.500.000	25	3.500.000	25	4.000.000	25	4.500.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	30.025.000	100	30.300.000	100	33.000.000	100	37.250.000	100	40.950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				30.025.000		30.300.000		33.000.000		37.250.000		40.950.000		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		10	30.025.000	10	30.300.000	10	33.000.000	10	37.250.000	10	40.950.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				30.025.000		30.300.000		33.000.000		37.250.000		40.950.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		10	30.025.000	10	30.300.000	10	33.000.000	10	37.250.000	10	40.950.000		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	43.547.000	100	44.000.000	100	46.300.000	100	48.800.000	100	52.050.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32.582.000		33.000.000		34.800.000		36.300.000		38.050.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja	12	12	32.582.000	12	33.000.000	12	34.800.000	12	36.300.000	12	38.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				22.732.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		26.250.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12	22.732.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	26.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.850.000		10.000.000		10.800.000		11.300.000		11.800.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	9.850.000	13	10.000.000	13	10.800.000	13	11.300.000	13	11.800.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.965.000		11.000.000		11.500.000		12.500.000		14.000.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	10.965.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.500.000	4	14.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.965.000		11.000.000		11.500.000		12.500.000		14.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	10.965.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.500.000	4	14.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	551.618.000	100	551.618.000	100	551.618.000	100	551.618.000	100	551.618.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		551.618.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000	10	551.618.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				102.650.100		123.500.000		128.500.000		133.500.000		134.900.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	102.650.100	100	123.500.000	100	128.500.000	100	133.500.000	100	134.900.000	7.01.0.00. 0.00.12.00 00 - Kapanewo n Semin	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				102.650.100		123.500.000		128.500.000		133.500.000		134.900.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	102.650.100	4	123.500.000	4	128.500.000	4	133.500.000	4	134.900.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	75	75				75		75		75			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				94.645.100		115.000.000		120.000.000		125.000.000		126.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	75	75	94.645.100	75	115.000.000	75	120.000.000	75	125.000.000	75	126.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8.005.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.900.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	8.005.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.900.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25.630.000		27.760.000		31.000.000		33.500.000		37.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	25.630.000	100	27.760.000	100	31.000.000	100	33.500.000	100	37.200.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25.630.000		27.760.000		31.000.000		33.500.000		37.200.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23	23	25.630.000	23	27.760.000	23	31.000.000	23	33.500.000	23	37.200.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2		4		1		4		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.800.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	1.800.000	2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.500.000		2.700.000		2.900.000		3.200.000		3.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23	23	2.500.000	23	2.700.000	23	2.900.000	23	3.200.000	23	3.400.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.000.000		10.000.000		11.500.000		12.000.000		13.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51	2	9.000.000	2	10.000.000	2	11.500.000	2	12.000.000	2	13.000.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4.000.000		4.200.000		4.500.000		4.900.000		5.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.500.000	1	4.900.000	1	5.300.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5.030.000		5.300.000		5.500.000		5.800.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2	5.030.000	4	5.300.000	1	5.500.000	4	5.800.000	1	7.000.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.100.000		2.300.000		2.500.000		2.800.000		3.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.100.000	1	2.300.000	1	2.500.000	1	2.800.000	1	3.000.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.200.000		1.260.000		1.600.000		1.800.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	1.200.000	2	1.260.000	2	1.600.000	2	1.800.000	2	2.000.000		

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya berbasis masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semin	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semin	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Indikator kinerja Kapanewon Semin secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kapanewon Semin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semin

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,66	97,67	97,68	97,69	97,7	97,71	97,72	
3.	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3	88,35	88,4	88,45	88,5	88,55	88,6	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, oleh karena itu Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029 disusun menurut Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semin.

Renstra Kapanewon Semin disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi kinerja 5 (lima) tahun yang lalu, serta isu-isu strategis yang berkembang. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Semin telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Renstra Kapanewon Semin Tahun 2025-2029 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Panewu selaku Kepala Perangkat Daerah. Dalam Renstra berisi visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Demikianlah Renstra Kapanewon Semin yang disusun ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat mengantisipasi besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti. Kami berharap agar Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Semin Tahun 2025-2029 akan berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.


PANEWU,
HARYANTO


BUPATI GUNUNGKIDUL,
SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA IKU

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kapanewon Semin														
CVII	ASPEK PELAYANAN UMUM													
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan hasil penilaian dari berbagai jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Kapanewon kepada masyarakat, Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan dan digabungkan menjadi satu indeks keseluruhan, yang mencerminkan performa pelayanan Kapanewon	{{(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi indeks, maka pelayanan Kapanewon semakin baik	1. Persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu 2. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu 3. Persentase kegiatan sosial terlaksana 4. Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 5. nilai indeks kepuasan masyarakat	97.66	97.67	97.68	97.69	97.70	97.71	97.72	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada	semakin tinggi indeks, maka survei tingkat kepuasan masyarakat semakin baik, yang berarti pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88.30	88.35	88.40	88.45	88.50	88.55	88.60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik melalui survey	masyarakat pengguna layanan	publik dinilai efektif, responsif, dan sesuai harapan pengguna layanan									
3	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase kegiatan sosial terlaksana	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana ÷ total kegiatan sosial yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka kegiatan sosial yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program sosial	Persentase kegiatan sosial terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu ÷ total kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi persentase, maka efektivitas peran kapanewon dalam fasilitasi perencanaan pembangunan di kalurahan semakin meningkat	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ÷ total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100%	Semakin tinggi persentase maka mencerminkan bahwa koordinasi berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu ÷ total kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi persentase, maka efektivitas peran kapanewon dalam memfasilitasi penganggaran di kalurahan semakin meningkat	Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	

METADATA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya berbasis masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semin	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	presentase Kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/ Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan kebudayaan yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan di kapanewon	100	100	100	100	100	100	100
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Presentase dalam Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan seperti reformasi kalurahan, penyusunan usulan	(jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan terlaksana/ jumlah kegiatan	Persentase yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan yang direncanakan	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)
		program dais kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dais tahun berjalan	penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan yang direncanakan) *100%	telah terlaksana, menandakan komitmen dan efektivitas kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik.	ketatalaksanaan, daftar rencana kegiatan tahunan, serta laporan fasilitasi pendampingan reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dais, dan monitoring-evaluasi kegiatan.							
7.01 - KECAMATAN												
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Menunjukkan Nilai AKIP t-1	Nilai AKIP t-1	Semakin tinggi nilai AKIP maka akuntabilitas kinerja semakin baik	Akumulasi capaian kinerja dari program	80.50	81.90	81.95	82.00	82.05	82.10	82.15
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Menunjukan Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana	(Jumlah Pelayanan Administrasi kapanewon terpenuhi ÷ Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang harus dipenuhi) x 100%	Semakin tinggi persentase maka pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan (%)	Menunjukkan Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan yang terlaksana	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Menunjukkan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ÷ total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100%	Semakin tinggi persentase maka Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Menunjukkan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ÷ Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)
			direncanakan) x 100%									
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Menunjukkan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100